BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Jawa Barat.

   Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Begitupun dokumen-dokumen yang digunakannya sudah sesuai dengan prosedur yang meliputi : SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), tetapi masih belum adanya verifikasi pada setiap tahapan prosedur dan perencanaan yang baik pada prosedur pencatatan penerimaan kas.

2. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Jawa Barat.

   Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi masih belum adanya pengendalian yang baik pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang.

3. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas kepada Pihak Ketiga pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Jawa Barat.

   Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas kepada Pihak Ketiga sudah cukup baik, tetapi masih belum adanya kontrol yang baik karena sering terjadinya kesalahan penulisan nama direktur atau referensi bank pada dokumen perusahaan.

4.2 Saran

Meskipun dalam Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah disajikan dengan wajar dan memadai, namun penulis memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi instansi yang berkaitan dengan prosedur penerimaan dan pengeluara kas, antara lain :

1. Pada Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas sebaiknya selalu dilakukan verifikasi pada saat penerbitan SP2D dan harus adanya perencanaan yang baik agar kemungkinan tidak tercatatnya penerimaan dan kemungkinan tidak diterimanya penerimaan kas dapat dikurangi sekecil mungkin.
2. Pada Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas sebaiknya terdapat pengendalian pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dengan adanya pemisahan fungsi antara yang mengeluarkan dan menerima uang.
3. Pada Prosedur Pengeluaran Kas kepada Pihak Ketiga sebaiknya terdapat kontrol dengan memeriksa kembali setiap dokumen perusahaan agar tidak terjadi

kesalahan seperti penulisan nama direktur atau referensi bank yang nantinya tidak akan menghambat terhadap diajukannya surat perintah pembayaran (SSP).